



Selektif Gunakan Anggaran

Bupati Ajak

Pertahankan WTP

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berusaha keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun 2016. Untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menyatakan akan memperketat proses laporan penggunaan anggaran pada setiap SKPD. "Saya berharap agar BPK bisa terus memberikan bimbingan kepada kami untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan dari pemda sehingga agar terjadi perbaikan dalam laporan pada tahun berikutnya," kata Rusman Ali disela-sela kegiatan penyampaian LHP di Kantor BPK RI

perwakilan Kalbar, Senin (15/2).

Berdasarkan reformasi birokrasi yang digabungkan pemerintah, saat ini setiap pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dimana untuk mengukurnya menggunakan indikatornya bisa dilihat dari peringkat opini dari BPK. "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dimana indikatornya adalah indeks kemudahan berusaha dan indeks kualitas pelayanan publik, dan kita bersyukur kota Pontianak bisa menjadi yang terbaik untuk kategori kota, demikian Kubu Raya juga bisa menjadi yang terbaik di Indonesia untuk kategori kabupaten," terangnya.

Menindaklanjuti akuntabilitas kinerja birokrasi yang menggunakan indikator efisiensi kinerja pemer-

intahan yang akuntabel, lanjutnya, pihaknya mengakui tidak mudah untuk mencapai tuntutan reformasi birokrasi yang ada saat ini. Hal itu dikamarkansinergisitas peraturan yang dibuat antara kementerian yang kadang tumpang tindih atau bertolak belakang sehingga membuat kita bingung, apa lagi ada PP yang tidak jelas.

"Misalnya saja untuk ASN, pemerintah daerah dianjurkan untuk meniadakan lelang jabatan untuk penempatan pejabat eselon II, namun untuk melaksanakannya tidak ada kepastian dari kementerian terkait karena belum adanya PP," jelasnya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI ini menambahkan keberhasilan meraih predikat WTP yang didapat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun sebelumnya tidak

terlepas dari kerja keras semua dinas dan instansi yang ada di lingkungan Pemkab Kubu Raya.

Menurutnya secara berhatap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kubu Raya mulai menerapkan laporan keuangan berbasis aktual, sehingga dari beberapa catatan yang diberikan BPK akan lebih mudah diperbaiki. Distribusi keuangan berbasis akrual adalah sebuah metode pencatatan dalam akuntansi, di mana setiap transaksi menjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. "Ke depan, sistem pengawasan distribusi anggaran akan lebih diperketat dan mesti sesuai ketentuan yang berlaku, agar predikat WTP bisa dipertahankan tahun 2016 untuk pertanggungjawaban distribusi APBD Kubu Raya tahun 2015," pungkasnya. (ash)